

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**



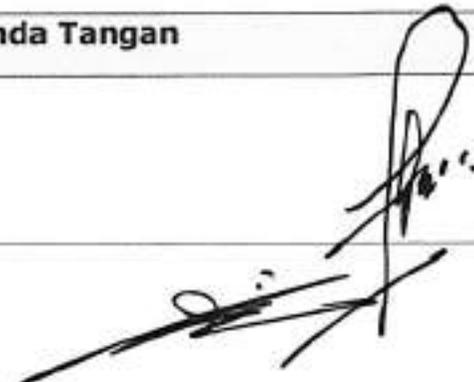
TAHUN 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH SURVEI ZI
LAPORAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPKP)
TRIWULAN II PERIODE TANGGAL 1 APRIL 2023 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023**

NO	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023	<p>Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Palembang SPKP Periode Triwulan II Tanggal 1 April 2023 s.d. 30 Juni 2023, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang untuk mengisi SiSuper.</p> <p>Terdapat 3 nilai terendah dari 8 unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP) yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U1 Dengan Nilai 481; 2. U3 Dengan Nilai 485; 3. U5 Dengan Nilai 485; 	<p>➤ Rekomendasi atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Palembang.</p>
1	Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi: Respon (U1)	<p>> Unsur Tindakan Diskriminasi merupakan Unsur ke-1 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll) ? 	<p>Rekomendasi:</p> <p>➤ Telah tersedia informasi pelayanan pada website dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang</p>

2	Prosedur (U3)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-3 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah prosedur/alur proses pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Telah terdapat prosedur berperkara dan informasi pada website Pengadilan Negeri Palembang
3	Biaya (U5)	<p>> Unsur Biaya Tambahan merupakan Unsur ke-5 dari 5 Unsur SPKP, dengan pertanyaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan pengadilan ? 	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat informasi mengenai biaya/tarif pada website Pengadilan Negeri Palembang dan juga papan biaya perkara sesuai radius

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Nilai Terendah dari Survei ZI Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang Triwulan Ke-II Tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	EDDY CAHYONO, SH.,MH	Hakim (Kordinator IPK)	
2	MUHAMAD AFIUDIN, SH.,MH	Panitera Muda Hukum	

Eviden tindakanjnt Survei Persepsi Kualitas Pelayanan

Point 1

The screenshot displays the website of the Mahkamah Agung Republik Indonesia (Indonesian Supreme Court) for the Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. The header includes the court's name, address (Jalan Kaplan A. Rivai No 36 Palembang), telephone number (0711 313555 - 313310), and email (papa@pa1a.pal.go.id). A search bar and language selector (Bahasa Indonesia) are also present. The main navigation menu includes Beranda, Tentang Pengadilan, Layanan Publik, Layanan Hukum, Berita, Hubungi Kami, and Reformasi Birokrasi. The content area is divided into several columns of service information:

- PENGANTAR DARI KETUA PENGADILAN**: Pengantar dari Ketua Pengadilan
- VISI MISI PENGADILAN**: Visi Misi Pengadilan
- KEPANITERAAN**: Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Tipikor, Kepaniteraan PHI
- SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN**: E-Learning, Kebijakan / Yurisprudensi, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Anggaran, DIPA, dan AKA-K/L, Pengawasan dan Kode Etik Hakim
- PROFIL PENGADILAN**: Sejarah Pengadilan, Struktur Organisasi, Wilayah Yuridiksi
- TATA TERTIB**: Tata Tertib di Pengadilan
- PTSP**: Jenis Layanan: Standar Pelayanan, Makhmat Pelayanan, Kompensasi Pelayanan
- LAYANAN DISABILITAS**: Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas
- PROFIL ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN**: Profil Role Model, Profil Agen Perubahan
- PROFIL HAKIM DAN PEGAWAI**: Profil Ketua Pengadilan, Profil Wakil Ketua Pengadilan, Profil Hakim, Profil Pejabat Kesekretariatan, Profil Pejabat Kepaniteraan, Profil Panitera Pengganti, Profil Jurisita/Jurusita Pongganti, Profil Fungsional Pranata dan Staf Pelaksana, Profil PPNPN
- INFORMASI PERKARA**: Delegasi, Statistik Perkara

Additional elements include a 'Berita' section on the left, a 'Denda T' section, and a 'Pengaduan' (Complaint) button on the right.

INFORMASI LAYANAN PADA WEBSITE



Menu Tentang Pengadilan

- PROFIL PENGADILAN >
- Sistem Pengelolaan Pengadilan >
- Standar Pelayanan**
- E-Learning
- Business Strategy
- Perencanaan Kerja Pengadilan
- Penggunaan dan Kode Etik Hakim
- Kejutan Pengadilan
- Bahan Ajar dan Referensi

Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang

DITULIS OLEH ADMIM DN 37 SEPTEMBER 2017. POSTED IN PENGUMUMAN

Cetak | E-mail



Standar Pelayanan Hukum 2023.pdf



Standar Pelayanan Pidana 2023.pdf



STANDAR PELAYANAN PADA WEBSITE

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANTERAAN PIDANA

PELAYANAN 1 JAM

1. Proses Upaya Hukum Banding a. Permohonan Banding b. Permohonan Restitusi dan Kurta Restitusi Banding	APRIL 2020
2. Proses Upaya Hukum Kasasi a. Permohonan Kasasi b. Permohonan Restitusi dan Kurta Restitusi Kasasi	
3. Permohonan Penghapusan Hukuman	
4. Permohonan Restitusi	
5. Permohonan Penghapusan Denda	
6. Permohonan Restitusi Perkara (Denda Pokok Sitaan)	
7. Permohonan Restitusi Perkara Pre-Peradilan	
8. Permohonan Restitusi Perkara (Merek)	
9. Permohonan Izin Berlakukanya	
10. Permohonan Restitusi Perkara Pidana	
11. Permohonan Restitusi Perkara Anak	
12. Permohonan Penghapusan Pembinaan	
13. Permohonan Izin / Permohonan Restitusi	
14. Permohonan Izin / Permohonan Penghapusan	
15. Permohonan Restitusi Perkara Perkara yang Tidak Dapat	
16. Permohonan Restitusi Perkara Perkara yang Tidak Dapat	

Kepala Pengadilan Negeri Palembang, 14 Oktober 2020
 H. Muhammad Muthi, SH, MH

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS**

JENIS PELAYANAN KEPANTERAAN HUKUM

PELAYANAN 1 JAM

1. Permohonan Restitusi	
2. Permohonan Surat Kasasi	
3. Permohonan Restitusi Perkara Pidana	
4. Permohonan Restitusi Perkara Pidana	
5. Permohonan Restitusi Perkara Pidana	
6. Permohonan Restitusi Perkara Pidana	

PELAYANAN 1 JAM LEBIH

No.	Jenis Layanan	Alasan
1.	Permohonan Restitusi Perkara	Salah satu pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tertentu.
2.	Permohonan Restitusi Perkara	Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tertentu.
3.	Permohonan Restitusi Perkara	Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tertentu.
4.	Permohonan Restitusi Perkara	Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tertentu.
5.	Permohonan Restitusi Perkara	Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan restitusi yang tidak dapat diterima oleh pengadilan karena alasan-alasan tertentu.

Kepala Pengadilan Negeri Palembang, 14 Oktober 2020
 H. Muhammad Muthi, SH, MH

JENIS LAYANAN PADA RUANG PTSP

Point 2



PROSEDUR INFORMASI



PROSEDUR BERPERKARA

Point 3



BIAYA PERKARA PADA WEBSITE DAN BIAYA PERKARA PADA PAPAN SESUAI RADIUS